

## Interaksi antar Aktor dalam Penyelenggaraan Asian Games 2018: Bentuk Wisata Olahraga Berkelanjutan melalui Kerja Sama Multipihak

Hanna Fauzie & Asra Virgianita  
Universitas Indonesia

Email: [hanna.farhana@ui.ac.id](mailto:hanna.farhana@ui.ac.id) & [asrahiui@ui.ac.id](mailto:asrahiui@ui.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kerja sama multipihak yang terjadi selama penyelenggaraan wisata acara olahraga Asian Games 2018 di Indonesia, sebagai bagian dari implementasi pariwisata berkelanjutan. Studi ini menggunakan kerangka kerja sama transaksional yang dikembangkan oleh Visseren-Hamakers et. al. (2007), yang menekankan pentingnya memahami interaksi dinamis antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Data yang digunakan berasal dari wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait dan analisis studi dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam kerja sama multipihak adalah ketimpangan dan hierarki dalam interaksi antara aktor internasional dan nasional. Olympic Council of Asia (OCA) memiliki peran dominan dan sumber daya yang lebih kuat, namun tidak mengutamakan aspek pariwisata berkelanjutan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Kelompok bisnis lebih fokus pada keuntungan daripada pembangunan berkelanjutan. Peran LSM dalam pengambilan keputusan terkait Asian Games terbatas, dan implikasi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan yang lebih setara antara aktor internasional dan nasional serta penguatan peran LSM dalam mendorong implementasi pariwisata berkelanjutan dalam acara olahraga tersebut.

**Kata kunci:** Wisata acara olahraga, wisata berkelanjutan, kerja sama multipihak, Asian Games 2018, OCA

### ABSTRACT

This research analyzes the multi-stakeholder collaboration that occurred during the organization of the tourism sporting event, Asian Games 2018, in Indonesia, as part of sustainable tourism implementation. The study adopts the transactional collaboration framework developed by Visseren-Hamakers et. al. (2007), emphasizing the significance of understanding dynamic interactions among government, private sector, and society in achieving goals, particularly within the context of sustainable development. Data for the study were derived from interviews with relevant stakeholders and the analysis of pertinent document studies. The findings reveal that the primary challenges in multi-stakeholder collaboration involve imbalances and hierarchies in interactions between international and national actors. The Olympic Council of Asia (OCA) assumes a dominant role with greater resources, yet neglects the aspect of sustainable tourism in the execution of Asian Games 2018. Business groups prioritize profits over sustainable development. The role of civil society organizations (CSOs) in decision-making related to the Asian Games is limited, underscoring the research's implications on the necessity for more equitable engagement between international and national actors, and the reinforcement of CSOs' role in driving sustainable tourism implementation in sporting events.

**Keywords:** sport event tourism, sustainable tourism, multi-stakeholder collaboration, Asian Games 2018, OCA

### PENDAHULUAN

Kegiatan pariwisata menjadi kajian baru dalam hubungan antar-bangsa. Pariwisata membawa migrasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Deklarasi Manila mengenai Pariwisata Dunia (*Manila Declaration on World Tourism*) tahun 1980 memperlihatkan bagaimana bidang pariwisata menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan internasional. Dalam deklarasi yang dihasilkan dari *The World Tourism Conference* ini pariwisata dilihat sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian karena akan mendorong saling ketergantungan dan memahami pada skala internasional (*UNWTO*, 1980, p. 1) Hal ini dapat terjadi karena negara akan bekerja sama satu sama lain dalam mendukung pariwisata global sehingga dapat mengurangi kemungkinan konflik antar negara. Pariwisata internasional menjadi kegiatan yang penting bagi negara karena memberikan efek terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang akan kemudian mempengaruhi cara setiap negara berinteraksi di level internasional.

Pariwisata juga dapat dilihat sebagai industri yang terus menerus berkembang. Setidaknya terdapat 1,4 juta turis internasional yang melakukan perjalanan pada tahun 2019 (*UNWTO*, 2019, p. 2). Turis internasional memberikan dampak ekonomi \$1,7 triliun atau sekitar 3,6% dari *GDP* Dunia (*UNWTO*, 2019, p. 4). Pengembangan pariwisata global diiringi dengan keterlibatan berbagai aktor atau pemangku kepentingan yang berbeda. Dalam skala global, terdapat beberapa aktor kunci dalam pariwisata seperti organisasi internasional (misalnya *United Nations World Tourism Organization - UNWTO* dan *World Travel and Tourism Council - WTTC*), swasta (seperti perusahaan perhotelan atau penyelenggara acara), pemerintah (baik pemerintah pusat suatu negara maupun pemerintah daerah), hingga organisasi non pemerintah. Keterlibatan aktor-aktor ini akan saling memengaruhi untuk membentuk kebijakan industri pariwisata pada tingkat global, nasional, maupun lokal.

Dalam studi Hubungan Internasional, industri pariwisata termasuk industri olahraga semakin banyak dianalisis dari berbagai perspektif ilmiah. Salah satunya adalah olahraga yang dipelajari sebagai media diplomasi. Acara olahraga internasional, seperti Olimpiade, digunakan sebagai wadah bagi negara-negara untuk berkompetisi tanpa perang. Studi oleh Gelbman (2019, p. 165) menunjukkan bahwa olahraga dapat menurunkan tensi antara negara, misalnya dalam kasus Palestina dan Israel. Selain itu, wisata olahraga juga berperan dalam konteks pariwisata, menjadi jembatan kontak sosial yang mendorong kerja sama

internasional, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan negara melalui kunjungan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Namun, penting untuk memperhatikan dampak negatif penyelenggaraan wisata olahraga, seperti yang terjadi pada Olimpiade Rio 2016, yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan krisis ekonomi (Drehs & Lajolo, 2017). Oleh karena itu, dimensi keberlanjutan harus diintegrasikan dalam pengelolaan wisata olahraga.

Wisata olahraga, dengan pengelolaan yang baik dan terencana, dapat memberikan dampak pada pembangunan berkelanjutan di suatu negara sekaligus mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (*SDGs*). Secara khusus, pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu target capaian spesifik pada *SDGs* Tujuan 8, 12, dan 14; yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan penggunaan sumber daya laut dan kelautan yang berkelanjutan. Namun, pariwisata juga dapat mendukung tujuan *SDGs* lain secara umum (*UNWTO*, 2023). Secara spesifik, wisata olahraga paling berkontribusi pada pencapaian *SDGs* Tujuan 8 dalam hal meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja dan pendapatan, pengeluaran pengunjung di wisata olahraga, dan meningkatnya daya saing dan daya tarik daerah tujuan wisata olahraga (Novitz, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir sebelum penyelenggaraan Asian Games, secara umum, industri pariwisata di Indonesia mengalami tren peningkatan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode 2014-2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan juga meningkatkan pendapatan ekonomi yang muncul dari sektor ini. Pengeluaran wisatawan untuk keperluan wisata, termasuk transportasi, penginapan, jasa tur, retribusi, dan sebagainya, akan berkontribusi secara positif bagi pendapatan daerah dan nasional, keuntungan industri pariwisata, termasuk keuntungan usaha kecil menengah yang berkaitan dengan industri pariwisata.

Perkembangan industri pariwisata diikuti juga dengan meningkatnya perhatian terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Hal ini mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, menyelaraskan aspek keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata. Indonesia mengimplementasikan aspek keberlanjutan dengan disahkannya Undang-undang Kepariwisata No. 10 tahun 2009. Pasal 2 Undang-undang Kepariwisata No. 10 tahun

2009 menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan salah satunya harus berlandaskan pada asas keberlanjutan. Upaya mengimplementasikan aspek keberlanjutan dalam pariwisata dilanjutkan dengan terjalinnya kerja sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan International Labour Organization (*ILO*) dalam menyusun Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak dan Ramah Lingkungan (*Green Job*) pada tahun 2012.

Pada tahun 2016, Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Panduan Destinasi Wisata Berkelanjutan. Panduan ini berisi kebijakan penentuan 10 Bali baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dengan prinsip-prinsip wisata berkelanjutan. Langkah tersebut memperlihatkan bagaimana Pemerintah Indonesia mulai membentuk industri pariwisata di beberapa titik yang turut menghadirkan isu keberlanjutan. Kebijakan 10 Bali Baru ini berlandaskan pada Surat Nomor B-652/Seskab/Maritim/11/2015 tentang Penajaman Program Pembangunan Kepariwisataaan.

Di sektor olahraga dan wisata acara olahraga, aspek berkelanjutan juga ditekankan oleh beberapa aktor nasional menjelang Asian Games 2018. Indonesia *Asian Games 2018 Organizing Committee/ Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC)* mencanangkan penyelenggaraan Asian Games 2018 secara ramah lingkungan. Hal ini ditujukan untuk mendukung perubahan kebiasaan masyarakat agar lebih peduli terhadap isu lingkungan. Berikut pernyataan Erick Thohir, Ketua *INASGOC* mengenai penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan prinsip ramah lingkungan,

*“Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang sudah dicanangkan ramah lingkungan. Lihat bagaimana perubahan di kawasan Gelora Bung Karno. Suksesnya Asian Games banyak, salah satunya bagaimana kami kembali connect to earth, atau kembali ke Bumi”* (Bolasport.com, 2018)

Sebagai *international mega-sporting event*, penyelenggaraan Asian Games melibatkan berbagai aktor nasional maupun internasional. Skala acara yang besar dalam level internasional membuat Indonesia harus mengatur dan melakukan kerja sama sebaik mungkin dengan aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan Asian Games. Atlet, media, hingga penonton domestik maupun internasional merupakan sebagian dari kelompok yang harus dikelola oleh Indonesia agar penyelenggaraan acara dapat berjalan dengan lancar.

Indonesia juga perlu bekerja sama dengan Olympic Council of Asia (*OCA*) sebagai *governing body* dari Asian Games.

Pelaksanaan Asian Games 2018 memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia. Acara ini tidak hanya menampilkan banyak unsur budaya lokal yang disiarkan dalam tujuh puluh lima negara, tetapi juga menjadi ajang diplomasi publik yang mencitrakan Indonesia dengan baik di tingkat internasional. Dari segi ekonomi, Indonesia mendapatkan banyak keuntungan, misalnya dari penjualan merchandise dan tiket, yang memberikan keuntungan bersih sekitar 60 miliar rupiah bagi *INASGOC* (Wibowo et al., 2021, p. 228). Semua dampak positif ini dapat dicapai berkat kerja sama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk *OCA* sebagai *governing-body* yang mengatur standar penyelenggaraan Asian Games di negara-negara tuan rumah seperti Indonesia, serta peran *INASGOC* sebagai komite penyelenggara yang berkolaborasi dengan *OCA* untuk memastikan kepentingan nasional juga terpenuhi dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Kementerian Keuangan (Okezone, 2018) mengungkapkan pembiayaan Asian Games 2018 bersumber dari APBN yakni sebesar Rp24 triliun. Pembiayaan dari *APBN* disiapkan sejak 2015 hingga 2018. Dana tersebut dibagi tiga berdasarkan penggunaannya yaitu untuk penyelenggaraan acara Asian Games 2018 sebesar Rp8,2 triliun yang dipergunakan *INASGOC* untuk persiapan, pembukaan, penyelenggaraan, hingga penuntasan penyelenggaraan Asian Games. Kemudian, dana sebesar Rp2,1 triliun untuk persiapan, pembinaan atlet, dan bonus bagi atlet, pelatih dan *official*. Dana yang ketiga adalah investasi sektor konstruksi sebesar Rp13,7 triliun yang dipergunakan untuk perbaikan fasilitas dan sarana Asian Games di Jakarta dan Palembang.

Selain kelompok swasta, terdapat pula *Indonesia Olympic Committee (IOC*, dahulu KONI – Komite Olahraga Nasional Indonesia) yang turut berperan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Selain *IOC*, beberapa *LSM* juga turut memberikan kontribusi meskipun dalam skala yang lebih kecil dalam bentuk kampanye yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Asian Games.

Dengan adanya berbagai aktor nasional maupun internasional yang saling bersinggungan dalam penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 maka fenomena ini dapat

dilihat dari studi hubungan internasional. Interaksi yang terjadi antar aktor yang berbeda baik dari sisi institusi maupun kepentingannya menarik untuk dikaji, khususnya dalam orientasi aktor terkait agenda pembangunan berkelanjutan. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian “bagaimana interaksi antar aktor dalam penyelenggaraan wisata acara olahraga berkelanjutan di Asian Games tahun 2018?”

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai wisata olahraga di Indonesia dan Asian Games 2018 dapat dibagi ke dalam tiga klaster utama. Klaster pertama terdiri dari penelitian-penelitian mengenai wisata olahraga di Indonesia. Klaster kedua fokus pada penelitian mengenai faktor politik dan diplomasi dari penyelenggaraan Asian Games 2018. Klaster ketiga fokus pada faktor ekonomi dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.

Pada klaster pertama, terdapat dua penelitian yang berfokus wisata olahraga di Indonesia. Dalam klaster ini, Astuti (2015) memaparkan potensi wisata olahraga, dengan peran serta masyarakat, dapat meningkatkan daya saing global dan pemasukan devisa bagi Pemerintah. Sementara, itu Masjhoer, et al. (2018) melakukan penelitian yang menemukan bahwa wisata olahraga dalam industri pariwisata mengalami perkembangan yang sangat signifikan di seluruh dunia. Dampak multi ganda dari penyelenggaraan wisata olahraga berupa peningkatan ekonomi, perbaikan infrastruktur, promosi destinasi wisata, dan pengembangan potensi daya tarik wisata.

Artikel-artikel pada klaster kedua lebih fokus untuk meneliti dampak politik mega-events Asian Games 2018 untuk Indonesia termasuk strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia. Asian Games 2018 dilihat sebagai strategi Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi olahraga (Al Mansyur, 2017; Supli et al., 2020), diplomasi publik dan nation branding (Putra, 2020; Tiffany & Azmi, 2020), diplomasi budaya (Sabrina & Saeri, 2021; Wibowo et al., 2021), serta bagaimana Asian Games dapat menjadi ajang untuk meningkatkan soft power Indonesia (Trotier, 2021).

Artikel-artikel pada klaster ketiga membahas bagaimana penyelenggaraan Asian Games 2018 sebagai acara olahraga internasional memberikan dampak ekonomi terhadap bisnis lokal (Rivani, 2018; Wikarya et al., 2022), efek berganda (multiplier effect) pengeluaran pemerintah untuk acara tersebut (Prasetyo et al., 2021), mendorong pembangunan infrastruktur olahraga terstandar internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjadi ajang promosi untuk citra positif bangsa sebagai pelaksana acara olahraga

(Rivani, 2018; Sukma & Afrizal, 2022), melihat dampak ekonomi Asian Games melalui perhitungan pengeluaran pengunjung internasional (Revindo et al., 2021), dan kepentingan ekonomi Indonesia untuk menetapkan Palembang sebagai salah satu kota tuan rumah (Dewi et al., 2020).

Penelitian-penelitian pada klaster pertama melihat pelaksanaan wisata olahraga di Indonesia, potensi, serta evaluasinya. Penelitian-penelitian pada klaster kedua fokus pada faktor politis dalam isu diplomasi, nation branding, dan soft power dari penyelenggaraan acara Asian Games 2018. Sementara itu, penelitian-penelitian pada klaster ke-tiga telah membahas mengenai faktor-faktor ekonomi dari Asian Games 2018, termasuk dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak wisata acara olahraga itu. Hampir keseluruhan klaster melihat pentingnya peran pemerintah dalam penyelenggaraan acara olahraga maupun bagi pengembangan wisata olahraga. Sebagian di antaranya juga sudah meneliti mengenai dampak dan peran pelaku bisnis (swasta) dan masyarakat dalam penyelenggaraan acara olahraga Asian Games 2018 maupun bagi pengembangan wisata olahraga secara umum, atau wisata olahraga berkelanjutan secara khusus di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata dan acara olahraga berkelanjutan yang baik menuntut kerja sama menyeluruh dari berbagai pihak. Namun, dari tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan, belum ada penelitian yang secara komprehensif melihat kerja sama internasional dalam penyelenggaraan wisata acara olahraga, khususnya wisata olahraga yang berkelanjutan. Kekosongan inilah yang akan penulis isi dengan menggunakan kasus penyelenggaraan Asian Games 2018 yang merupakan salah satu penyelenggaraan mega-sporting event terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

## **KERANGKA ANALISIS**

### **Wisata Acara Olahraga dan Keberlanjutan dalam Hubungan Internasional**

Penyelenggaraan wisata olahraga internasional memiliki dimensi penting dalam hubungan antar-negara, meliputi ekonomi, pencitraan negara, dan politik keamanan. Industri wisata olahraga menjadi bagian krusial dalam bisnis global wisata dan perjalanan, yang sebelum pandemi Covid-19, bernilai 800 triliun dolar Amerika dan diperkirakan tumbuh 36% setiap tahunnya (Wikarya et al., 2022). Dampak ekonomi dari acara olahraga internasional terlihat

baik secara langsung maupun jangka panjang, dengan jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat saat acara berlangsung, serta peningkatan wisatawan internasional yang terpapar melalui siaran global. Selain itu, penyelenggaraan acara olahraga juga memiliki nilai penting dalam mencitrakan negara, menarik media, wisatawan, dan sponsor, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional dan menggerakkan perekonomian negara tersebut (Wikarya et al., 2022, p. 338).

Di sisi lain, penyelenggaraan acara olahraga seringkali digunakan sebagai alat untuk menunjukkan sikap politik suatu negara pada level internasional. Pada masa Pemerintahan Soekarno, Indonesia menggunakan acara olahraga sebagai alat untuk mengekspresikan sikap politiknya secara internasional. Misalnya, Soekarno berupaya menjadikan Indonesia pemimpin gerakan negara Dunia Ke-tiga yang netral, dengan mendirikan *New Emerging Forces (NEFO)* untuk melawan kekuatan colonial (Trotier, 2018, p. 3). Melalui penyelenggaraan *Games of the New Emerging Forces (GANEFO)* pada tahun 1963, Indonesia menyatukan negara-negara bekas penjajahan sebagai bentuk perlawanan terhadap *International Olympic Committee (IOC)* yang dianggap mewakili dominasi negara-negara Dunia Pertama dan Ke-dua dalam dunia olahraga (Trotier, 2018). Selain itu, pada Asian Games 1962, Indonesia juga menunjukkan sikap politik dengan menolak memberikan visa kepada delegasi Taiwan dan Israel sebagai dukungan terhadap Cina dan negara-negara Arab. Aksi politik tersebut menyebabkan Indonesia keluar dari *IOC* dan dikenai sanksi pada tahun 1963.

Dalam pembangunan berkelanjutan, wisata acara olahraga juga memiliki posisi yang semakin penting. Sebagai bagian dari komitmen global untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan dalam Millenium Development Goals dan *SDGs*, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk memastikan aspek keberlanjutan dalam pembangunan di berbagai bidang. Pariwisata, dalam hal ini, juga dapat secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada pencapaian seluruh tujuan *SDGs* (UNWTO, 2023). Wisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai bentuk wisata dengan strategi pembangunan pariwisata yang meminimalisir konsekuensi negatif kerusakan lingkungan, ekonomi, dan sosial (Graci, 2013). Wisata berkelanjutan akan mengharuskan kompleksitas di tahapan perencanaan, pembangunan, dan manajemen pengelolaan sumber daya dan tata kelola (Graci, 2013).



Dalam kaitan dengan pembangunan keberlanjutan, wisata olahraga memiliki karakteristik yang membuat sektor ini unggul secara komparatif dalam mendorong pencapaian *SDGs*. Karakteristik-karakteristik tersebut, adalah (1) kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, (2) kesempatan untuk melakukan interaksi, (3) potensi pembangunan yang tinggi di berbagai kesempatan, termasuk olahraga ringan seperti olahraga jalan kaki (*UNWTO*, 2019). *UNWTO* (2023) menyatakan bahwa seluruh tujuan *SDGs* dapat didukung dan mempunyai irisan dengan sektor pariwisata, meskipun secara eksplisit pariwisata hanya menjadi target spesifik pada tiga tujuan, yaitu tujuan (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan (14) ekosistem lautan. Berkaca pada irisan tersebut, maka penyelenggaraan acara wisata olahraga perlu dimaksimalkan untuk turut merealisasikan pembangunan keberlanjutan dan pencapaian tujuan *SDGs*.

Asian Games 2018 sebagai bentuk wisata acara olahraga yang sedang berkembang menuntut kerja sama antara banyak pihak untuk dapat diselenggarakan dengan baik dan mendatangkan keuntungan maksimal bagi Indonesia sebagai negara tuan rumah. Irisan wisata acara olahraga dengan isu keberlanjutan turut menjadikan keberhasilan wisata acara olahraga menjadi semakin penting. Oleh karena itu hubungan kerja sama yang terjadi dalam penyelenggaraan Asian Games akan dianalisis menggunakan konsep kerja sama multipihak dan model transaksional dalam sub-bab selanjutnya.

### **Kerjasama Multipihak**

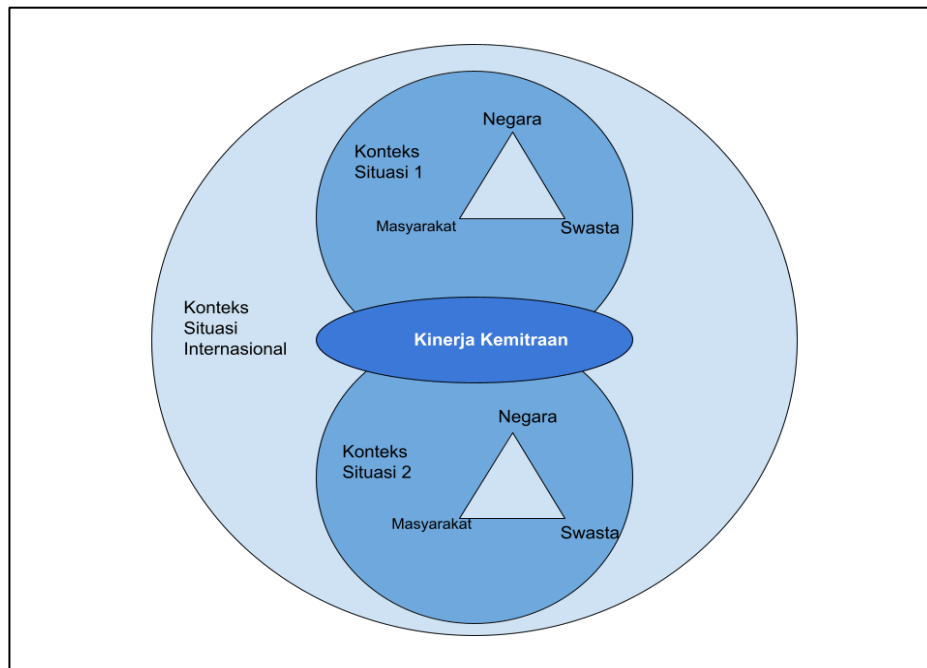
Penelitian ini akan menggunakan paradigma instrumental dari Visseren-Hamakers (2007) yang menjelaskan kerja sama negara utara-selatan dalam kerja sama pembangunan dalam model transaksional. Model transaksional memperlihatkan pemerintah, pelaku pasar (swasta) dan/atau kelompok masyarakat sipil baik di negara berkembang maupun di negara maju bekerja sama, sehingga menggabungkan pendekatan kemitraan untuk kerja sama pembangunan (Visseren-Hamakers et al., 2007, p. 140). Model ini oleh Visseren-Hamakers, et al. dipakai untuk melihat kerja sama pada bidang kerja sama pembangunan berkelanjutan.

Walaupun model transaksional Visseren-Hamakers digunakan untuk menjelaskan spesifik kerja sama dalam pembangunan berkelanjutan, namun model ini bisa digunakan untuk melihat kerja sama multipihak dalam wisata olahraga. Pembangunan berkelanjutan dan wisata olahraga mempunyai kemiripan dalam hal usia sektor ini berkembang. Visseren-Hamakers berargumen jika topik pembangunan berkelanjutan masih berusia beberapa tahun, sehingga tidak banyak ‘ketergantungan jalur’ untuk dipelajari. Meskipun demikian, di sisi lain, interaksi di dalam dan di antara kemitraan diwarnai oleh aturan main dan hubungan kekuasaan di masa lalu (seperti tradisi diplomatik dan ketergantungan antara pemerintah antara donor dan penerima) (Visseren-Hamakers et al., 2007, p. 141). Hal ini juga ditemukan pada isu pembangunan wisata olahraga yang masih berusia relatif muda.

Model pembangunan transaksional berbeda dengan model pembangunan lainnya karena terdapat penekanan terhadap hubungan negara utara dan selatan. Hubungan negara utara-selatan tidak bersifat horizontal, melainkan vertikal (Visseren-Hamakers et al., 2007, p. 141). Hubungan intersektoral dalam model pembangunan transaksional tidak terbatas pada pemerintah-swasta atau swasta-masyarakat secara horizontal namun juga pemerintahan negara maju-berkembang atau swasta negara maju-berkembang yang dilihat secara vertikal. Oleh karena itu, terdapat kekuasaan yang lebih dari negara utara untuk mempengaruhi kerja sama pembangunan di negara selatan.

Model transaksional mempunyai tiga konteks situasi yang berbeda. Terdapat dua konteks situasi nasional (negara maju dan berkembang) dan satu konteks internasional yang akan membentuk suatu kinerja kemitraan (Visseren-Hamakers et al., 2007, p. 141). Konteks ini merujuk kepada pengaturan kebijakan pada isu-isu tertentu dan juga terhadap kondisi pasar mengenai produk dan jasa tertentu (Visseren-Hamakers et al., 2007, p. 141). Pengaturan kebijakan isu di konteks internasional mempengaruhi hubungan kemitraan negara maju-berkembang. Kinerja kemitraan terlihat dari sejauh mana membangun hubungan dan menciptakan hasil yang baru. Gambar di bawah ini memperlihatkan operasionalisasi konsep model transaksional dari Visseren-Hamakers, et al. (2007).

### Operasionalisasi Konsep Model Transaksional



Sumber: Diolah kembali dari Visseren-Hamakers et. al. (2007)

Operasionalisasi konsep Visseren-Hamakers et. al. (2007) diadopsi sebagai model analisa penelitian ini. *OCA* mempunyai kekuatan politik dalam pengaturan acara olahraga di Asia sehingga posisinya vertikal dengan Indonesia. Terdapat juga perusahaan multinasional yang dilibatkan sebagai sponsor dari Asian Games dan berperan sebagai sektor swasta. Selain itu terdapat *NGO* nasional maupun internasional dalam membingkai penyelenggaraan acara wisata olahraga di Indonesia.

Dengan menggunakan kerangka kerja sama multipihak dari Visseren Hamakers et al. (2007), kolaborasi antar aktor dalam kerja sama multipihak dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 dilihat dari posisi aktor dan perannya. Kelompok aktor internasional seperti *OCA* memberikan kesempatan bagi Indonesia menyelenggarakan Asian Games 2018. Di sisi lain, Indonesia melalui *INASGOC* dapat menyelenggarakan wisata acara olahraga yang dapat membangun citra negara, selain memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Dalam menyelenggarakan Asian Games 2018, dibutuhkan sumber daya materil, yang selain dipenuhi dari anggaran negara, juga didapatkan dari partisipasi perusahaan di tingkat internasional maupun nasional. Partisipasi masyarakat melalui *LSM* dapat berperan

untuk memastikan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi melalui penyelenggaraan Asian Games 2018.

Akan tetapi, posisi antar kelompok aktor tidak setara seperti juga ditunjukkan oleh alur berpikir dari Visseren-Hamakers et. al. (2007). Terdapat kelompok aktor yang lebih dominan daripada kelompok aktor lainnya. Dengan meminjam alur berpikir tersebut, penelitian ini memperlihatkan kerja sama antar aktor tidak berada pada posisi yang setara. Terdapat hubungan yang vertikal dalam mekanisme untuk mengatasi tantangan atau masalah yang sebelumnya tidak dapat dilihat dalam pendekatan kerja sama multipihak tradisional.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan fokus pada kualitas objek penelitian (Bazeley, 2013, p. 3). Menurut Neuman (Neuman, 2014, p. 204), penelitian kualitatif menggunakan data berupa informasi dan bukti-bukti empiris yang bersifat non-numerik, termasuk kata-kata, tindakan, suara, simbol, objek fisik, atau gambar visual.

Untuk menjelaskan proses kerja sama multipihak dalam penyelenggaraan wisata acara olahraga, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Neuman (Neuman, 2014, p. 480), pada pendekatan studi kasus, konsep dan bukti, yang didapatkan dari data, saling bergantung satu sama lain. Untuk menentukan kasus, data dan teori menjadi penting pada tahapan awal penelitian, meskipun proses ini dapat terus berubah dan berkembang hingga akhir penelitian (Neuman, 2014, p. 480). Penelitian ini menggunakan kasus Asian Games 2018 karena acara tersebut adalah acara wisata olahraga terbesar yang berlangsung di Indonesia sejak pelaksanaan Asian Games tahun 1962.

Penelitian kualitatif menggunakan data yang variatif jenisnya dengan bentuk dan ukuran yang variatif, beragam jenisnya, dan tidak dalam standar yang sama (Neuman, 2014, p. 204) Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder dalam berbagai bentuk dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Metode penelitian minimal berisikan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penulisan setiap paragraf dimulai dengan menjorok ke dalam.

## PEMBAHASAN

### Identifikasi dan Pemetaan Aktor dalam Penyelenggaraan ASIAN Games 2018

Asian Games merupakan acara multi-olahraga (multi-sports event) yang diselenggarakan pada tingkat regional Asia di berbagai negara tuan rumah yang berbeda. Acara olahraga yang melibatkan negara yang berbeda-beda mengharuskan adanya instrumen pengaturan yang disepakati bersama. penyelenggaraan Asian Games melibatkan berbagai aktor internasional yang bekerja lintas batas negara, seperti *OCA* maupun perusahaan multinasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Asian Games di suatu negara juga perlu melibatkan penyelenggara Asian Games pada tingkat internasional.

Asian Games 2018 melibatkan berbagai aktor internasional yang mempunyai kepentingan masing-masing. Pada pengaturan kebijakan, *OCA* merupakan *governing body* yang mempunyai kekuatan politik dalam mempengaruhi penyelenggaraan Asian Games di seluruh Asia. *OCA* menentukan ketentuan penyelenggaraan Asian Games seperti peraturan kompetisi olahraga, penentuan tuan rumah, tes doping hingga otoritas terhadap pendanaan spesial dari Asian Games (*Olympic Council of Asia*, 2014, p. 69). *OCA* merupakan organisasi tunggal yang memiliki kemampuan untuk menentukan proses penyelenggaraan Asian Games di berbagai negara.

Perusahaan multinasional turut terlibat dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Meskipun sumber utama pendanaan Asian Games berasal dari *APBN*, namun perusahaan multinasional memiliki peran dalam mendukung pendanaan penyelenggaraan acara dengan bentuk sponsorship. Setidaknya terdapat sepuluh perusahaan multinasional yang menjadi mitra atau sponsor di Asian Games 2018.

Perusahaan multinasional memiliki keahlian yang terkait dengan acara olahraga Asian Games 2018, salah satunya adalah Tissot, sebuah perusahaan jam mewah asal Swiss yang aktif dalam berbagai acara olahraga di seluruh dunia. Tissot menghadirkan layanan pengaturan waktu dan skor yang akurat dan andal untuk olahraga profesional, termasuk Asian Games (Tissot, 2023). Peran Tissot dalam memastikan keadilan dan daya saing acara olahraga sangat penting. Selain itu, keterlibatan mereka dalam acara olahraga juga berkontribusi pada peningkatan citra dan reputasi perusahaan, karena asosiasi dengan acara olahraga internasional seperti Asian Games membuka kesempatan untuk menjangkau

audiens yang luas dan beragam dalam mempromosikan produk mereka (Grohs, 2016, p. 410). Tissot menjadi contoh bagaimana perusahaan multinasional ikut terlibat sebagai sponsor dalam acara olahraga internasional.

Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia melibatkan tidak hanya aktor pada tingkat internasional. Aktor-aktor nasional yang terlibat dalam Asian Games 2018 dapat dikelompokkan menjadi 3, pemerintah, swasta dan *LSM*. *INASGOC* merupakan komite nasional yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. *INASGOC* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 (Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015). Sebagai panitia nasional, *INASGOC* bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden (Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015).

Perusahaan nasional ikut terlibat dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Setidaknya terdapat 21 perusahaan yang memberikan kontribusi sumber daya maupun operasional untuk penyelenggaraan (*asiangames2018*, 2018). Mayoritas aktor swasta nasional yang menjadi sponsor dalam Asian Games 2018 adalah Badan Usaha Milik Negara (*BUMN*). Partisipasi *BUMN* dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 dilihat sebagai perpanjangan tangan pemerintah (CNN Indonesia, 2017). Aktor nasional dari pemerintah *INASGOC-BUMN* menjadi sangat beririsan dalam mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018.

Tidak hanya peran swasta dalam penyelenggaraan Asian Games 2018, pemerintah turut mengundang *LSM* pada saat persiapan penyelenggaraan. Salah satu *LSM* tersebut adalah Koaksi Indonesia yang turut berdiskusi dengan pemerintah untuk mengetahui persiapan dalam menghadapi Asian Games 2018 (Coaction, 2018). Koaksi Indonesia merupakan *LSM* yang aktif dalam memberikan kontribusi pada program-program pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Coaction, 2018). Selain itu terdapat World Wide Fund for Nature- Indonesia (*WWF-Indonesia*) yang turut bekerja sama dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Partisipasi mereka memperlihatkan peran *LSM* dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 ditujukan untuk kepentingan isu keberlanjutan (*sustainability*).

**Kerja Sama Transaksional dalam menghasilkan harmonisasi kepentingan antar Aktor pada Penyelenggaraan Asian Games 2018**

Setelah menjelaskan aktor serta perannya pada sub-bab sebelumnya. Bagian ini menjelaskan interaksi antar aktor tersebut dalam harmonisasi kepentingan pada penyelenggaraan Asian Games 2018. Acara olahraga kerap digunakan sebagai ajang untuk memperkuat *nation branding* di mata internasional. Pagelaran seperti *SEA Games*, *BWF Indonesia Open*, Jakarta Marathon, atau kejuaraan surfing di Banyuwangi, berdampak positif terhadap citra Indonesia. Penyelenggaraan Asian Games 2018 yang ditujukan untuk peningkatan citra Indonesia di dunia internasional juga diafirmasi oleh Wishnutama. Berikut adalah hasil wawancara dengan Wishnutama mengenai Asian Games 2018 dan dampaknya bagi Indonesia.

*“sporting event itu bisa jadi salah satu daya tarik luar biasa yang mendatangkan devisa, tergantung daya tariknya seperti apa, bisa multi-event kaya Asian games, bisa kayak golf, sepak bola, segala macam, daya tarik bisa langsung dan tidak langsung”*

Selain peningkatan citra, adanya penyelenggaraan Asian Games 2018 juga ditujukan untuk pengembangan wisata acara olahraga di Indonesia. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari berbagai acara olahraga internasional. Hal ini disampaikan oleh Gatot S. Dewa Broto sebagai Direktur Keuangan *INASGOC* sekaligus Sekretaris Kementerian Olahraga (2017-2018). Berikut pernyataan Gatot mengenai wisata acara olahraga di Indonesia,

*“Kalo perkembangan sport tourism relatively bagus pasca Asian Games, indikatornya gini, makanya kenapa waktu itu pak Jokowi mendorong agar semakin banyak event itu dibawa ke Indonesia, dan sekarang sudah kita lakukan. Contohnya setelah itu kita ada Mandalika, kemudian DKI mengadakan Formula E, untuk tahun ini saja di bulan Agustus-September ada kejuaraan dunia basket FIBA, kemudian termasuk FIFA juga, FIFA itu dampak Asian Games juga, kemudian bulan awal agustus ANOC with Beach Game di Bali, jadi itu sebagai bagian dari disarankan, ternyata dampaknya besar, itu dalam konteks gawe dunia.”*

Akan tetapi penyelenggaraan wisata acara olahraga di Indonesia dengan skala internasional yang relatif baru menyebabkan turis yang datang masih didominasi oleh turis lokal. Sehingga dampak wisata acara olahraga dari segi turis belum menghasilkan secara

masif. Berikut pernyataan Gatot S. Dewa Broto mengenai turis dan wisata acara olahraga di Indonesia,

*“Memang kalau dari sisi secondary, kalo primer itu orang yang melekat dengan kontingen misalnya atlet, support personnel, tim, itu saya sebut primer. Kalo sekunder, kemudian apa bisa bawa warga negara Singapur[a], karena masih banyak orang-orang lokal, misalnya di Mandalika itu masih banyak orang-orang lokal. Itu belum signifikan. Tapi kan itu effort ya, jadi kita berharap nanti semakin banyak dilakukan, dengan catatan yang secondary-nya belum terlaksanakan.”*

Setelah Vietnam mengundurkan diri sebagai tuan rumah, interaksi antar aktor dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 mulai terjadi. Indonesia sebelumnya gagal dalam bidding, tetapi kemudian melakukan lobi kepada *OCA* untuk mendapatkan status tuan rumah pada tahun 2014 (Broto, 2018, p. 71). Selain itu, Indonesia juga berusaha meyakinkan *OCA* untuk tetap menyelenggarakan Asian Games pada tahun 2018, meskipun *OCA* merencanakan penyelenggaraan pada tahun 2019 atau setahun sebelum Olimpiade Tokyo 2020. Setahun kemudian, Indonesia kembali melakukan lobi agar Asian Games diselenggarakan di dua kota, yaitu Jakarta dan Palembang, yang akhirnya berhasil (Broto, 2018, p. 77). Dengan berhasilnya lobi ini, Indonesia menciptakan preseden penyelenggaraan Asian Games 2018 di dua kota yang berjauhan.

Dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, terjadi tarik-menarik kepentingan antara Indonesia dan *OCA*. Pada Oktober 2017, kontrak tuan rumah mengalami perubahan di mana pencairan dana yang semula hanya setelah pembukaan Asian Games pada Agustus 2018, dapat dilakukan lebih cepat. Hasil negosiasi ini mencerminkan interaksi kepentingan antar aktor nasional-internasional dalam penyelenggaraan Asian Games. Bagi *OCA*, standar internasional menjadi penting dan mereka memperhatikan revitalisasi infrastruktur olahraga melalui rapat koordinasi dengan *INASGOC*. Sebagai tuan rumah, Indonesia perlu menunjukkan komitmen terhadap infrastruktur standar internasional agar penyelenggaraan Asian Games berjalan lancar. Sementara itu, *OCA* sebagai governing body berusaha menjaga standar penyelenggaraan untuk meningkatkan popularitas Asian Games. Selain menjadi acuan untuk event olahraga lain di Indonesia, interaksi kepentingan ini mempengaruhi kesuksesan Asian Games 2018 secara keseluruhan.

Penyelenggaraan Asian Games 2018 berperan dalam mendorong interaksi antar aktor terkait isu pembangunan berkelanjutan. *OCA* meluncurkan *Sports and Environment*



*Awards* untuk mempromosikan kampanye lingkungan dalam acara ini, meningkatkan kesadaran tentang olahraga hijau di tingkat lokal, nasional, dan global (Campelli, 2018). Pada tingkat nasional, Pemerintah Indonesia membangun infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan, termasuk *LRT* di Jakarta dan Palembang, dan *MRT* di Jakarta, meskipun kedua proyek ini tidak dapat diselesaikan pada saat penyelenggaraan Asian Games 2018. Selain itu, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan Holcim dalam renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (*SUGBK*) menggunakan bahan yang ramah lingkungan (Holcim, 2018). Dalam konteks daerah, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan polusi sebelum Asian Games 2018 dimulai, serta menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan selama penyelenggaraan untuk mengatasi kemacetan dan polusi (CNN Indonesia, 2018). Dengan demikian, Asian Games 2018 berperan sebagai pemicu kebijakan berbasis lingkungan di kota tuan rumah.

Penyelenggaraan acara olahraga internasional, termasuk Asian Games 2018, secara langsung mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pariwisata, meskipun secara eksplisit hanya disebutkan dalam target SDGs ke 8, 12, dan 14, beririsan dengan seluruh tujuan *SDGs* menurut *UNWTO (2023)*. Asian Games 2018 mendukung pencapaian Tujuan 8 dengan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja melalui peningkatan pengunjung dan pengeluaran mereka, serta meningkatkan daya saing kota penyelenggara. Peningkatan ekonomi juga tercermin dalam peningkatan bisnis lokal dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Asian Games 2018 mendukung pencapaian Tujuan 12 dan 14 dengan meningkatkan kesadaran dan mendorong praktek lingkungan yang berkelanjutan melalui kampanye lingkungan yang melibatkan *LSM* internasional dan nasional. Dengan demikian, penyelenggaraan Asian Games 2018 berperan dalam mendukung SDGs secara komprehensif.

Asian Games 2018 menjadi tolak ukur baru dalam wisata acara olahraga yang membuka ruang bagi isu keberlanjutan di Indonesia. Untuk memaksimalkan wisata acara olahraga dalam pencapaian *SDGs* dan pembangunan berkelanjutan secara umum, Indonesia perlu mempertimbangkan secara spesifik isu keberlanjutan sejak proses perencanaan. Signifikansi isu keberlanjutan dalam pariwisata olahraga juga dikonfirmasi oleh Sapta

Nirwandar (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Periode 2011-2014) yang mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan wisata acara olahraga

*“Kita juga harus memikirkan faktor sustainability. Ke depan kita harus memasukkan hal ini dalam penyelenggaraan olahraga di sini [di Indonesia], [karena] ke depan ini akan sangat diperhitungkan. Jangan hanya menggelar acara tapi juga harus memikirkan keberlanjutannya.”*

Akan tetapi, interaksi antar aktor dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 tidak memiliki hubungan yang setara. Menggunakan term dari Visseren-Hamakers et. al. (2007), adanya hubungan vertikal antara aktor yang berinteraksi dalam kerja sama multipihak model transaksional. Hubungan vertikal dapat dilihat dari interaksi dalam pendanaan Asian Games 2018. Kelompok aktor internasional (*OCA* dan perusahaan multinasional) mendominasi pengaturan pendanaan di Asian Games 2018.

*OCA* mengharuskan adanya anggaran pendanaan dari *APBN*. *OCA* mendorong adanya alokasi dana terpisah untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 hingga mengunjungi Kementerian Keuangan pada Desember 2016 (Broto, 2018, p. 108). Untuk mengejar target infrastruktur berstandar internasional, Indonesia menggunakan mekanisme dana darurat pemerintah agar pendanaannya bisa dilakukan secara cepat. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (*APBN*) hingga pembagian sponsor yang tidak seimbang menyebabkan Indonesia menanggung sebagian besar pendanaan penyelenggaraan Asian Games 2018. Kementerian Keuangan (Okezone, 2018) mengungkapkan Asian Games 2018 menghabiskan dana *APBN* sebesar Rp24 triliun.

Jika menggunakan kerangka model kerja sama transaksional, terjadi irisan yang dilihat sebagai hasil interaksi antar kelompok aktor. Aktor-aktor internasional mempunyai kepentingan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 terutama *OCA* yang berperan sebagai *governing body*. Aktor nasional juga turut mendorong kepentingannya lewat partisipasi pekerja Indonesia dalam konsultan penyelenggaraan. Hasil interaksi tarik menarik kepentingan tersebut adalah standar penyelenggaraan Asian Games 2018 yang merupakan irisan dari antar aktor internasional dan nasional.

Penyelenggaraan Asian Games 2018 secara mencolok menggambarkan hubungan kuasa antara *OCA* dan Indonesia. Sebagai *governing body*, *OCA* memiliki kendali yang signifikan atas acara tersebut, meskipun Indonesia bertindak sebagai tuan rumah yang

berperan penting dalam penyelenggaraannya. *OCA* memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan kebijakan, mengikuti standar internasional, dan menentukan agenda yang lebih luas dalam Asian Games 2018. Sebagai akibatnya, *INASGOC* harus tunduk pada aturan dan permintaan *OCA*, menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan dengan *OCA* yang memiliki kontrol yang lebih besar daripada Indonesia.

*WWF*, sebuah *LSM*, ikut berperan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018, dengan *WWF* Indonesia mewakili kepentingannya. Meskipun tidak berinteraksi langsung dengan *OCA*, *OCA* menugaskan *INASGOC* untuk mengurus acara tersebut. Partisipasi *WWF* Indonesia memberikan kesempatan bagi *WWF* Internasional untuk memperluas pengaruhnya dalam isu lingkungan secara global dan meningkatkan kesadaran terhadap isu lingkungan. Mereka memperkuat citra sebagai pemimpin dalam konservasi alam. *WWF* Indonesia berperan penting dalam mewakili kepentingan organisasi dalam Asian Games 2018 dan berinteraksi dengan *INASGOC* untuk mendorong praktik lingkungan yang berkelanjutan dalam acara tersebut.

Kerja sama multipihak memungkinkan partisipasi berbagai aktor dalam proses pembuatan kebijakan penyelenggaraan. Akan tetapi, partisipasi Koaksi Indonesia dan *WWF*-Indonesia terbatas dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan saja (Coaction, 2018). Partisipasi *WWF*-Indonesia juga terbatas pada kampanye isu keberlanjutan lingkungan. *INASGOC* bekerja sama dengan *WWF*-Indonesia dalam kampanye *Earth Hour* (memadamkan listrik selama satu jam) dan penghentian perdagangan satwa yang dilindungi (*WWF* Indonesia, 2018, pp. 1–2). Hal ini memperlihatkan *LSM* tidak banyak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dalam acara olahraga di Indonesia khususnya Asian Games 2018. Terbatasnya pelibatan *LSM* terjadi karena adanya kekosongan peraturan formal untuk penyelenggaraan Asian Games 2018. Kekosongan peraturan tersebut membuat *LSM* tidak dapat berpartisipasi secara langsung kepada proses penyelenggaraan Asian Games 2018.

Peran terbatas *LSM* menunjukkan dinamika kekuasaan dan akses informasi yang tidak seimbang di luar hubungan vertikal aktor internasional-nasional. Meskipun *LSM* penting untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam acara tersebut, akses terbatas pada

informasi dan proses pengambilan keputusan menghambat kontribusi signifikan mereka. Hal ini mencerminkan keterbatasan inklusivitas dalam kerja sama bagi aktor selain pemerintah dan swasta. *LSM* hanya diberi ruang terbatas untuk sosialisasi dan keterlibatan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.

Keterbatasan partisipasi *LSM* dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 mengakibatkan pengawasan isu sosial dan lingkungan tidak optimal. *LSM* seperti Koaksi dan WWF, yang fokus pada isu lingkungan dan keberlanjutan, dapat berperan penting dalam memastikan pertimbangan dampak lingkungan selama acara jika diberikan peran yang lebih besar. Keterlibatan aktif *LSM* dapat membantu penyelenggara mengelola lingkungan dengan lebih baik, seperti pengelolaan limbah dan energi yang efisien. Perluasan keterlibatan *LSM* dalam perencanaan dan pelaksanaan Asian Games 2018 akan membantu mencapai tujuan wisata acara olahraga dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Walaupun terjadi hubungan vertikal dengan *OCA* namun Indonesia menyadari pentingnya Asian Games 2018 untuk mencapai tujuannya. Pernyataan dari narasumber memperlihatkan Indonesia menyadari bahwa melalui penyelenggaraan Asian Games 2018, Indonesia memiliki kesempatan untuk peningkatan citra, promosi wisata olahraga, pembangunan infrastruktur, menunjukkan kekayaan budaya, prestasi olahraga, dan potensi ekonomi kepada dunia. Oleh karena itu, ketidaksetaraan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tidak membuat Indonesia untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagai tuan rumah dan memanfaatkan Asian Games 2018 untuk mencapai tujuan mereka yang lebih besar.

## **KESIMPULAN**

Dalam penyelenggaraan Asian Games 2018, Indonesia mempertimbangkan secara matang terkait usaha dan biaya yang dikeluarkan berbanding dengan keuntungan yang diharapkan. Indonesia berupaya untuk menjadi tuan rumah dengan melihat sejauh mana acara olahraga ini akan menguntungkan untuk pemenuhan kepentingan nasional. Dampak positif dari perhelatan tersebut terbukti signifikan, mencakup aspek ekonomi, pariwisata, pembangunan infrastruktur olahraga, serta meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dalam aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Seluruh dampak ini berkontribusi positif untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Setiap aktor memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Pada tingkat internasional, *OCA* sebagai governing body dari Asian Games, memiliki peran yang sangat strategis. Perusahaan multinasional berperan untuk membantu pendanaan atau sponsorship. Adapun *LSM* turut berperan dalam memberikan masukan terhadap kepentingan lingkungan penyelenggaraan Asian Games 2018. Pola hubungan *governance-private-NGO* di tingkat internasional juga tercermin dalam tingkat nasional. Adanya *INASGOC*, perusahaan nasional dan *LSM* nasional juga saling memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.

Dengan menggunakan kerangka kerja sama transaksional, terdapat hubungan vertikal antara kelompok aktor internasional dengan aktor nasional. Aktor internasional mempunyai kekuatan lebih besar dalam penyelenggaraan Asian Games. Sedangkan aktor nasional hanya mempunyai posisi sebagai penyelenggara saja. Walaupun terjadi perubahan kontrak tuan rumah namun tidak mengubah posisi kelompok aktor nasional dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Di sisi lain, partisipasi *LSM* lebih terbatas dibandingkan dengan aktor lainnya. *LSM* hanya mendapatkan peran sosialisasi isu keberlanjutan bukan peran utama dalam proses perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Hal ini menyebabkan kepentingan keberlanjutan tidak menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.

Meskipun ada ketidakseimbangan, Indonesia tetap menjalankan peran sebagai tuan rumah dengan keyakinan pada tujuan jangka panjang yaitu membangun tata kelola wisata acara olahraga. Terjadi dinamika antara *INASGOC* dan *OCA*, di mana *INASGOC* berhasil mendapatkan beberapa perubahan ketentuan yang menguntungkan mereka. Akan tetapi, hubungan vertikal antara *INASGOC* dan *OCA* membatasi keberhasilan yang dicapai. *OCA* tetap mengendalikan proses penyelenggaraan, termasuk mendorong adanya pendanaan melalui APBN Indonesia. Asian Games 2018 memakai dana APBN sebesar Rp24 triliun. Pembiayaan dari APBN untuk sektor ini disiapkan sejak 2015 hingga 2018. Meskipun interaksi antar aktor tidak setara, hal tersebut tidak mengurangi keyakinan Indonesia untuk menyelenggarakan Asian Games 2018.

Penyelenggaraan Asian Games 2018 menjadi tolak ukur baru bagi penyelenggaraan wisata olahraga berkelanjutan di Indonesia. Kesuksesan Asian Games memudahkan Indonesia untuk menyelenggarakan acara wisata olahraga lainnya seperti Asian Para Games, PON Papua hingga persiapan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 yang dibatalkan. Walaupun terjadi peningkatan standar penyelenggaraan setelah Asian Games namun tidak menutup kemungkinan jika kerja sama transaksional masih terjadi dalam acara wisata acara olahraga di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Mansyur, M. I. (2017). "Diplomasi Olahraga dalam Perspektif Komunikasi Internasional Menyongsong Asian Games 2018". *Transformasi*, 33(1), 1–5.
- antaranews.com. (2017). *Media plays important role in success of Asian Games 2018*. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/113888/media-plays-important-role-in-success-of-asian-games-2018>
- Artha Graha News. (2019). *Artha Graha News Edisi Jan-Feb 2019*. Jakarta: Artha Graha News.
- asiangames2018. (2018). *Asiangames2018.id*. asiangames2018.id. Diakses pada 23 Maret 2023.
- Astuti, M. T. (2015). "Potensi Wisata Olahraga dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan". *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 10(1).
- Austin, J. E. (2007). *Sustainability through Partnering: Conceptualizing Partnership between Businesses and NGOs*. In *Partnership, Governance, and Sustainable Development: Reflections on Theory and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Bazeley, P. (2013). *Qualitative data analysis: Practical strategies*. New York: SAGE Books.
- BeritaSatu.com. (2013, October 1). *Jakarta Siap jadi Destinasi "World Sport Tourism."* beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/wisata/141444/jakarta-siap-jadi-destinasi-world-sport-tourism>
- Besnier, N., Brownell, S., & Carter, T. F. (2018). *The anthropology of sport: Bodies, borders, biopolitics*. Berkeley: University of California Press.
- Biermann, F., Chan, M., Mert, A., & Pattberg, P. (2007). *Multi-Stakeholders Partnerships for Sustainable Development: Does the Promise Hold*. In *Partnerships, Governance and Sustainable Development: Reflections on Theory and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Broto, G. S. D. (2018). *Turbulensi Sport di Indonesia: Sport Uniting the Nation*. Jakarta: PT Media Andalas Sejahtera.
- Campelli, M. (2018, May 28). *Green sports advocates to win awards and scholarships at the 2018 Asian Games – Sustainability Report*. <https://sustainabilityreport.com/2018/05/28/green-sports-advocates-to-win-awards-and-scholarships-at-the-2018-asian-games/>

- CNN Indonesia. (2017). *JK Yakin Target Sponsor Rp1,5 Triliun Asian Games Terpenuhi*. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20170822175528-178-236526/jk-yakin-target-sponsor-rp15-triliun-asian-games-terpenuhi>
- Coaction. (2018). *Tentang Koaksi Indonesia*. Koaksi Indonesia. <https://coaction.id/tentang-koaksi-indonesia/>
- Dewi, P. A., Dharmiasih, D. A. W., & Resen, P. T. K. (2020). “Kepentingan Indonesia Menjadikan Palembang sebagai Co-Host City dalam Asian Games 2018”. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(2), 1–15.
- Drehs, W., & Lajolo, M. (2017, October 8). *One Year after Rio: What’s Left Behind after the Flame Goes Out*. ESPN.Com. [https://www.espn.com/espn/feature/story/\\_/id/20292414/the-reality-post-olympic-rio](https://www.espn.com/espn/feature/story/_/id/20292414/the-reality-post-olympic-rio)
- Gelbman, A. (2019). “Sport Tourism and Peace: Crossing the Contested Wall”. *Tourism Geographies*, 21(1), 163–189. <https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1519718>
- Glasbergen, P., Biermann, F., & Mol, A. P. J. (Eds.). (2007). *Partnerships, governance and sustainable development: Reflections on theory and practice*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Graci, S. (2013). “Collaboration and Partnership Development for Sustainable Tourism”. *Tourism Geographies*, 15(1), 25–42. <https://doi.org/10.1080/14616688.2012.675513>
- Grohs, R. (2016). “Drivers of brand image improvement in sports-event sponsorship”. *International Journal of Advertising*, 35(3), 391–420. <https://doi.org/10.1080/02650487.2015.1083070>
- Hall, C. M. (1992). *Hallmark Tourist Events: Impacts, Management and Planning*. London: Belhaven Press.
- Holcim. (2018). *Asian Games 2018 go for sustainability gold*. *Sustainable Construction & Building Company | Holcim*. <https://www.holcim.com/what-we-do/reference-projects/gelora-bung-karno-thrucrete-colocrete>
- Kementerian Kominfo. (2017). *Energi Asia: Booklet Asian Games 2018*. Jakarta: Kementerian Kominfo.
- Masjhoer, J. M., Susetyarini, O., & Nur, P. (2018, February). “Implementasi Sport Tourism dalam Pemanfaatan Potensi Sungai di Indonesia Studi kasus: International Musi Triboatton 2015”. STIPRAM National Conference on Tourism “Recent Advances on Ecotourism : Toward Sustainable Tourism,” Yogyakarta, Indonesia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.)*. London: Pearson Education Limited.
- Novitz, T. (2022). *SDG 8: Promote Sustained, Inclusive and Sustainable Economic Growth, Full and Productive Employment and Decent Work for All*. In J. Ebbesson & E. Hey (Eds.), *The Cambridge Handbook of the Sustainable Development Goals and International Law* (1st ed., pp. 208–230). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108769631.010>
- Nye, J. S. (2004). “Soft power: The means to success in world politics (1st ed)”. *Public Affairs*.
- OCA. (2023). *Jakarta—Palembang 2018*. <https://ocasia.org/games/5-jakarta-palembang-2018.html>

- Olympic Council of Asia. (2014). *Olympic Council of Asia (OCA) Constitution and Rules*. Olympic Council of Asia.
- Prasetyo, E., Ariutama, I. G. A., & Saputra, A. H. (2021). "The Impact of Asian Games 2018 on Indonesian Economy". *Economics Development Analysis Journal*, 10(4).
- Putra, R. I. (2020). "Strategi Membangun Nation Branding Indonesia dalam Asian Games Jakarta-Palembang 2018". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1).
- Revindo, M. D., Widyasanti, A. A., Siregar, C. H., & Hambali, S. (2021). "Factors explaining the expenditure of sports event participants and spectators: Evidence from the 2018 Asian Games". *Journal of Sport & Tourism*, 25(2), 105–127. <https://doi.org/10.1080/14775085.2021.1883460>
- Rivani, E. (2018). *Potensi Asian Games 2018 Bagi Perekonomian Indonesia* (Vol X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018).
- Sabrina, D. A., & Saeri, M. (2021). "Diplomasi Budaya Indonesia melalui Asian Games 2018". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2).
- Sukma, M. & Afrizal. (2022). "Dampak Ekonomi dan Politik Indonesia Setelah Menjadi Tuan Rumah Asian Games 2018". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1).
- Supli, N. A., Susilowati, R., & Permata, I. M. (2020). "Environmental Aspects and Public Concern for the Environment as Part of Sport Diplomacy at the 2018 Asian Games". *Sriwijaya Journal of Environment*, 5(2).
- The Jakarta Post. (2018). *2018 Asian Games: Time for Indonesia to shine*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/travel/2018/06/28/2018-asian-games-time-for-indonesia-to-shine.html>
- Tiffany, A., & Azmi, F. (2020). "Diplomasi Publik Indonesia melalui Penyelenggaraan Asian Games 2018". *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(3), 202. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26193>
- Tissot. (2023). *Tissot World Sport Partnerships*. Tissotwatches.Com. <https://www.tissotwatches.com/en-en/tissot-world-sport-partnerships>
- Trotier, F. (2018). *The Legacy of the Games of the New Emerging Forces and Indonesia's Relationship with the International Olympic Committee*. In *Olympics in Conflict*. Oxfordshire: Routledge.
- Trotier, F. (2021). "Indonesia's Position in Asia: Increasing Soft Power and Connectivity through the 2018 Asian Games". *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 9(1), 81–97. <https://doi.org/10.1017/trn.2020.12>
- UNWTO (Ed.). (1980). *Manila Declaration on World Tourism*. <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.01.01>
- UNWTO (Ed.). (2019). *International Tourism Highlights, 2019 Edition*. World Tourism Organization (UNWTO). <https://doi.org/10.18111/9789284421152>
- UNWTO. (2023). *Tourism in the 2030 Agenda | UNWTO*. <https://www.unwto.org/tourism-in-2030-agenda>
- Visseren-Hamakers, I. J., Arts, B., & Glasbergen, P. (2007). *Partnership as Governance Mechanism in Development Cooperation: Intersectoral North–South Partnerships for Marine Biodiversity*. In P. Glasbergen, F. Biermann, & A. Mol, *Partnerships, Governance and Sustainable Development* (p. 12817). Cheltenham: Edwar Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847208668.00017>



- Wibowo, D. C., Savira, C. M., Kinasih, A. R., Renata, K. Y., Ananda, R., & Pangestu, D. K. (2021). "Asian Games 2018 Sebagai Implementasi Diplomasi Publik Indonesia". *Jurnal Sentris, Edisi Khusus Diplomasi*.
- Wikarya, U., Widyasanti, A. A., Revindo, M. D., Siregar, C. H., & Dewi, C. E. (2022). "Impact of International Sports Event on Local Businesses: Insight from the Stallholders and Official Partners of the 2018 Asian Games". *JEJAK*, 15(2), 336–353. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i2.36216>
- WWF Indonesia. (2018). *Stadion Utama GBK Menjadi Ikon Earth Hour 2018 #Connect2Earth*. WWF Indonesia.